

**EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN CADANGAN
BERAS PEMERINTAH (CBP) DALAM STABILISASI
PASOKAN DAN HARGA PANGAN (SPHP) DI PERUM
BULOG KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA DAN
BANTEN**

Disusun oleh:

NAMA : FAUZIATUL IFA
NIM : 2441021068
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan

Administrasi



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

PROGRAM MAGISTER TERAPAN

TAHUN 2025



**EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN CADANGAN
BERAS PEMERINTAH (CBP) DALAM STABILISASI
PASOKAN DAN HARGA PANGAN (SPHP) DI PERUM
BULOG KANTOR WILAYAH JAKARTA DAN
BANTEN**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister

Terapan

Oleh

Nama : Fauziatul Ifa

NPM : 2441021068

Jurusan : Manajemen Kebijakan Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

TESIS

PROGRAM MAGISTER TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAKARTA, 2025

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

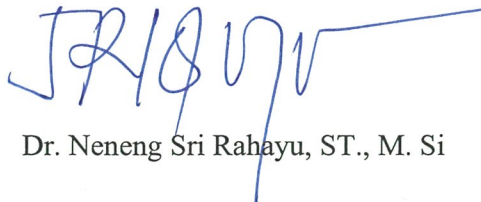
**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN
DALAM UJIAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN
TESIS**

Nama	:	Fauziatul Ifa
Npm	:	2441021068
Jurusan	:	Manajemen Kebijakan Publik
Program Studi	:	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	:	Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia)	:	Evaluasi Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) Di Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta Dan Banten
Judul Tesis (Bahasa Inggris)	:	<i>The Performance Evaluation of Government Rice Reserves (CBP) Policy in Food Supply and Prices Stabilization (SPHP) by Perum BULOG DKI Jakarta dan Banten Region Office</i>

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis
Pada, 16 Oktober 2025

Pembimbing



Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M. Si

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : FAUZIATUL IFA
NPM : 2441021068
JURUSAN : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL TESIS : EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN
CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP)
DALAM STABILISASI PASOKAN DAN
HARGA PANGAN (SPHP) DI PERUM BULOG
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA DAN
BANTEN

Telah mempertahankan tesis di hadapan panitia penguji tesis Program
Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN
Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Oktober 2025
Pukul : 15.00 s.d. 16.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M. Si

Sekretaris : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA

Anggota : Dr. Hidayaturahmi, MPA

Pembimbing : Dr. Neneng Sri Rahayu, M. Si



The block contains the official blue circular stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta. The stamp features the institution's logo in the center and the text 'POLITEKNIK STIA LAN' and 'JAKARTA' around the perimeter. Overlaid on the stamp are several handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the thesis defense panel members listed on the left.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fauziatul Ifa
NPM : 1931020107
Jurusan : Manajemen Kebijakan Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul Evaluasi Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil **plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Peneliti



Fauziatul Ifa

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul, **“Evaluasi Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister terapan pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa selama proses penyusunan tesis ini masih mengalami banyak hambatan dan kekurangan yang tidak mungkin dapat dilalui tanpa dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Dr. Bambang Giyanto, M. Pd, selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Magister Terapan
3. Bapak Edy Sutrisno, S.E., M. Si, selaku Ketua Tim Penguji, Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, MPA selaku Sekretaris dan Ibu Dr. Hidayaturahmi, MPA selaku Anggota yang telah memberikan kritik dan masukan untuk menyempurnakan tesis ini.
4. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M. Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan petunjuk, bimbingan, dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.
5. Bapak Jan Piter, Bapak Aziz, Bapak Dedy Rahman, Ibu Khania, Ibu Fitri, Ibu Yuyun Kurnia, Ibu Sri Purwanti, Bapak Ari Rosadi, Ibu Wulansari yang telah bersedia memberikan informasi kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.
6. Segenap dosen dan staff Politeknik STIA LAN yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti mengikuti perkuliahan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

7. Bapak Muhammad Saifulloh dan rekan kerja di Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kemenko Perekonomian Republik Indonesia
8. Keluarga peneliti yang peneliti cintai, ayah (Jamzuri), Ibu (Siti Maemunah), suami tercinta (Luthfi Sabda Sahdana), dan anak tercinta (Haikal Ahsan Sahdana) atas segala dukungan moral dan materil serta doa yang telah diberikan kepada peneliti selama ini.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan telah membantu peneliti selama ini. Mohon maaf bila namanya tidak disebutkan oleh peneliti.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penelitian. Peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Peneliti,

Fauziatul Ifa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn 2003 dengan 6 (enam) aspek yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan kelayakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dilakukan dengan 9 (sembilan) orang *key informant* yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung. Hasil evaluasi pada kebijakan CBP dalam SPHP di Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten dinilai dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kebijakan ini menunjukkan kelayakan untuk dilanjutkan, meskipun kinerja kebijakan ini belum mencapai tingkat optimal pada beberapa kriteria dan masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi. Adapun strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk menghadapi tantangan adalah dengan melakukan sinergi pengawasan bersama Satgas Pangan untuk melakukan langkah korektif atas indikasi adanya penyimpangan penyaluran SPHP beras, menyusun kebijakan penyederhanaan dalam pertanggungjawaban penyaluran SPHP, dan menyiapkan kebijakan yang mendelegasikan Perum BULOG sebagai pendistribusi beras premium untuk memenuhi preferensi masyarakat dalam meningkatkan branding dan marketing.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Government Rice Reserve (CBP) Policy in Stabilizing Food Supply and Prices (SPHP) at Perum BULOG Regional Office of DKI Jakarta and Banten. The theory used on this study is the policy evaluation theory developed by William N. Dunn (2003) with of 6 (six) assessment aspects: effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness, and appropriateness. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used were: interviews, observation, and documentation studies. This study used structured interviews conducted with 9 (nine) key informants who have direct knowledge and involvement. The results of the evaluation of the CBP policy in SPHP at Perum BULOG Regional Office of DKI Jakarta and Banten are assessed from the aspects of effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness, and appropriateness. Based on the results, it can be concluded that this policy shows feasibility to continue, although the performance of this policy has not reached the optimal level in some criteria and there are still many challenges faced. The short-term, medium-term, and long-term strategies to face these challenges are to synergize joint supervision with the food task force to take corrective actions on indications of irregularities in the distribution of SPHP rice, to formulate policies to simplify accountability for SPHP distribution, and to prepare policies that delegate Perum BULOG as a distributor of premium rice to meet people's preferences in improving branding and marketing.

Keyword: Policy Implementation, Government Rice Reserve (CBP) Policy, Stabilizing Food Supply and Prices (SPHP)

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Rumusan Permasalahan.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	21
1. Tinjauan Kebijakan.....	21
2. Tinjauan Teoritis.....	26
a. Administrasi Pembangunan.....	26
b. Kebijakan Publik.....	28
c. Evaluasi Kebijakan.....	32
d. Strategi Kebijakan.....	38
C. Operasionalisasi Konsep.....	40
D. Kerangka Berpikir.....	41
BAB III.....	43
METODOLOGI PENELITIAN.....	43

A. Metode Penelitian	43
B. Teknik Pengumpulan Data.....	43
C. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	48
D. Instrumen Penelitian	51
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten	53
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	62
1. Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah Jakarta dan Banten	62
2. Strategi agar Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) Di Perum BULOG Kantor Wilayah Jakarta Dan Banten dapat diimplementasikan dengan Optimal.....	111
BAB V.....	123
PENUTUP	123
A. Simpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127
Lampiran.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi pengadaan dalam negeri	3
Tabel 1. 2 Realisasi pengadaan luar negeri.....	3
Tabel 1. 3 Realisasi penggunaan CBP 2021-2024	6
Tabel 1. 4 Produksi dan Konsumsi Bulan Januari-September (Juta Ton Beras)	7
Tabel 4. 1 Perkembangan Harga Beras di Wilayah DKI Jakarta	65
Tabel 4. 2 Realisasi Penyaluran SPHP secara Nasional tahun 2025	70
Tabel 4. 3 Kebutuhan Anggaran Penyaluran Beras SPHP Tahun 2025	79
Tabel 4. 4 Stok CBP menurut Kantor Wilayah Per 24 September 2025	83
Tabel 4. 5 Stok Beras di Food Station Cipinang Jakarta	85
Tabel 4. 6 Penyaluran SPHP di Kanwil DKI Jakarta dan Banten Tahun 2024	87
Tabel 4. 7 Realisasi Penyaluran SPHP Tahun 2025	88
Tabel 4. 8 Berikut Penyaluran SPHP menurut Saluran Tahun 2025.....	91
Tabel 4. 9 Penyaluran SPHP di Kanwil DKI Jakarta dan Banten Tahun 2024	91
Tabel 4. 10 Matriks Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan	106
Tabel 4. 11 Analisis TOWS	113
Tabel 4. 12 Metode <i>Multiple Criteria Analysis</i> (MCA) Jangka Pendek	116
Tabel 4. 13 Metode <i>Multiple Criteria Analysis</i> (MCA) Jangka Menengah.....	118
Tabel 4. 14 Metode <i>Multiple Criteria Analysis</i> (MCA) Jangka Panjang	119

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Luas lahan dan Produktivitas Padi	10
Gambar 1. 2 Produksi Padi Provinsi DKI Jakarta	11
Gambar 1. 3 Produksi Padi Provinsi Banten.....	11
Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Gambar 2. 2 TOWS Matriks	39
Gambar 2. 3 Model Berpikir	42
Gambar 3. 1 <i>Key Informant</i> Penelitian	45
Gambar 4. 1 Lokasi Penelitian Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten	54
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Perum BULOG Kanwil Jakarta dan Banten	55
Gambar 4. 3 Beras SPHP di Ritel Modern.....	93

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CPP	: Cadangan Pangan Pemerintah
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
SPHP	: Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
HET	: Harga Eceran Tertinggi
Kanwil	: Kantor Wilayah
Perum	: Perusahaan Umum
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
AFSR	: <i>Aggrement on the ASEAN Food Security Reserve</i>
APTERR	: <i>ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve</i>
SP2KP	: Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok
SWOT	: <i>Strengths, Weaknesses, Opportunity, dan Threats</i>
RPK	: Rumah Pangan Kita
TPK	: Toko Pangan Kita
HBKN	: Hari Besar Keagamaan Nasional
OIP	: Operator Investasi Pemerintah
GPM	: Gerakan Pangan Murah

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu administrasi publik memiliki keterkaitan dengan proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan metode-metode yang digunakan dari suatu program pembangunan untuk melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran Pembangunan (Ngusmanto, 2015). Salah satu kebijakan administrasi pembangunan sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 melalui *astacita* kedua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Perpres, 2025). Pangan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kebutuhan utama manusia dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan secara merata, cukup, bermutu, aman, dan bergizi seimbang dengan memanfaatkan budaya lokal, sumber daya, dan kelembagaan (Pangan, 2012).

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan produsen dan konsumen beras, yang sekaligus sebagai kawasan rawan bencana alam. Guna penanganan kebutuhan darurat negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand bersepakat untuk membentuk cadangan beras ASEAN dengan penandatanganan *Aggrement on the ASEAN Food Security Reserve* (AFSR) di New York pada tahun 1979. Perkembangan AFSR semakin pesat sehingga pada tahun 2012 sepuluh anggota negara ASEAN secara resmi mendirikan *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR). Enam aspek yang perlu ditangani dalam kesepakatan tersebut yaitu memperkuat basis produksi beras masing-masing anggota, mengadopsi kebijakan dan mengelola cadangan beras secara efektif, mencegah adanya kehilangan hasil, stabilisasi harga beras, meningkatkan gizi dan

konsumsi terutama kelompok rawan, dan meningkatkan pendapatan petani (Hermanto, 2014).

Kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, di Indonesia dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah diatur dalam Perpres 125/2022, disebutkan bahwa terdapat 11 komoditas yang dikelola yaitu beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur, gula pasir, minyak goreng, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Pemerintah yaitu Badan Pangan Nasional memberikan penugasan untuk mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui Perum BULOG untuk mewujudkan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Penyelenggaraan cadangan beras pemerintah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

Strategi penyelenggaraan CBP dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Metode pengadaan dapat dilakukan melalui mekanisme *contract farming*, kemitraan, maupun *closed loop*. Pengadaan dari luar negeri dapat dilakukan dengan kondisi ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk pemenuhan cadangan dan stabilisasi harga dalam negeri. Pengelolaan CBP meliputi pemeliharaan, penyimpanan, pengolahan, pemerataan stok, dan pelepasan stok. Target sasaran penyaluran antara lain untuk mengatasi masalah pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bencana alam, bencana sosial, kerja sama internasional.

Saat ini cadangan pangan pemerintah lebih banyak berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibandingkan dengan cadangan jagung dan cadangan kedelai. Jumlah Cadangan Beras Pemerintah dapat dikatakan cukup ketika jumlah minimal yang dikelola 2.400.000 ton dan jumlah minimal stok akhir tahun 1.200.000 (Bapanas, 2024). Indikator harga beras dapat dikatakan stabil ketika tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah. HET yang

ditetapkan oleh pemerintah berbeda-beda di setiap wilayah, misalnya di wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat, HET beras medium Rp 12.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg. Sedangkan HET di wilayah Maluku dan Papua lebih tinggi yaitu HET beras Medium Rp 13.500 per kg dan HET beras premium Rp 15.800 per kg.

Berikut tren pelaksanaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari tahun 2020-2024:

Tabel 1. 1 Realisasi pengadaan dalam negeri

Bulan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	6.935	13.260	8.374	6.021	6.203
Februari	39.359	19.850	6.992	6.774	9.161
Maret	43.876	201.526	48.702	80.605	19.676
April	85.978	338.253	201.222	202.000	224.936
Mei	251.072	134.729	138.684	268.417	393.913
Juni	269.078	31.515	146.835	127.854	73.274
Juli	168.927	79.769	73.771	69.875	47.049
Agustus	63.874	107.692	33.018	41.339	54.654
September	32.972	107.114	55.955	45.877	124.685
Oktober	125.579	98.256	94.817	46.311	166.415
November	143.782	29.881	137.658	65.880	126.529
Desember	25.121	54.465	48.623	105.925	12.586
Jumlah	1.256.507	1.216.311	994.651	1.067.777	1.259.080

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Dari data diatas menunjukkan total realisasi pengadaan dalam negeri sampai dengan tanggal 15 Desember 2024 sebesar 1.259.080 ton setara beras terdiri dari CBP sebanyak 828.386 ton dan beras komersial sebesar 430.695 ton. Pengadaan tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan realisasi empat tahun terakhir.

Tabel 1. 2 Realisasi pengadaan luar negeri

Bulan	Tahun		
	2022	2023	2024
Januari	-	240.955	325.883
Februari	-	83.444	546.482
Maret	-	111.041	478.420
April	-	70.900	315.537
Mei	-	254.788	381.660
Juni	-	155.674	254.858
Juli	-	249.363	146.356
Agustus	-	225.449	137.900
September	-	139.839	147.650
Oktober	-	321.246	193.580
November	-	425.246	336.759
Desember	57.417	531.235	150.873
Jumlah	57.417	2.809.180	3.415.958

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pengadaan beras luar negeri pada tahun 2024 sebesar 3.415.958 ton lebih besar dari pada pengadaan tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 2.809.180 ton dan 57.417 ton. Pengadaan ini berasal dari beberapa negara antara lain Vietnam, Thailand, Pakistan, Myanmar, dan Kamboja.

Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan program penyaluran CBP dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi gejolak harga beras pada tingkat konsumen. Program ini dimulai dari tahun 2022 hingga sekarang tahun 2025. SPHP beras menggunakan CBP berasal dari pembelian langsung menggunakan harga pembelian pemerintah atau kebijakan fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras dalam rangka penyelenggaraan CBP, pembelian stok komersial Perum BULOG dan pengadaan luar negeri atas penugasan pemerintah. Sasaran penjualan SPHP dilakukan pada pasar tradisional, toko/ritel modern, dan perdagangan melalui sistem elektronik yang terjangkau oleh masyarakat. Saluran penjualan SPHP meliputi pengecer (pedagang pasar,

swalayan, RPK, TPK, Koperasi, dan pedagang eceran lainnya, pemerintah daerah melalui gerakan pasar murah, distributor besar, sinergi BUMN melalui outlet binaan, dan perdagangan melalui sistem elektronik. Dana pelaksanaan SPHP menggunakan dana cadangan beras pemerintah dengan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pangan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Perum BULOG menyalurkan SPHP beras periode Juli sampai dengan Desember 2025 di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan target 1.318.826.629 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan) kg. Rincian target alokasi penyaluran SPHP beras ditetapkan berdasarkan antara lain pertimbangan realisasi penyaluran SPHP beras per provinsi atau wilayah atau kabupaten/kota atau cabang tahun 2023-2024, kondisi stok operasional dan ketersediaan beras di gudang Perum BULOG, kebutuhan konsumsi beras masyarakat, permintaan mitra Perum BULOG, kondisi pasokan dan rata-rata harga nasional, biaya distribusi, dan usulan dari pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten atau dari Perum BULOG.

Realisasi penyaluran cadangan beras pemerintah dari tahun 2021 sebesar dari tahun 2021 sebesar 800.874, mengalami peningkatan hingga tahun 2024 sebesar 3.306.271 ton. Realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras s.d. 15 Desember 2024 sebesar 1.355.117 ton yang diharapkan mampu menekan laju kenaikan harga di akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025. Proporsi realisasi SPHP beras paling besar adalah pengecer (65,7 %), diikuti distributor (29,6 %), satuan tugas (3,2 %), pemerintah daerah (1,2 %), dan sinergi BUMN (0,3%). Realisasi bantuan pangan juga cukup signifikan sebesar 1.961.370 yang terbagi menjadi tiga tahap, tahap I sejumlah 659.677 ton, tahap II sejumlah 653.613 ton, dan tahap III sejumlah 648.080 ton. Realisasi penyaluran CBP tanggap darurat/bencana alam tahun 2024 sampai dengan 15 Desember 2024 sebanyak 381 ton dan realisasi golongan anggaran sebesar 89.403 ton. Hal tersebut terangkum dalam data dibawah ini:

Tabel 1. 3 Realisasi penggunaan CBP 2021-2024

Penyaluran	2021	2022	2023	2024
SPHP	767.869	1.261.225	1.196.727	1.355.117
Bantuan Pangan	-	-	1.492.919	1.961.370
Bencana Alam	8.744	4.732	2.302	381
Golongan Anggaran	24.234	87.949	84.671	89.403
Total	800.874	1.353.906	2.776.619	3.306.271

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan cadangan beras pemerintah saat ini masih belum optimal. Stok beras yang berlebih sehingga perlu percepatan penyaluran CBP terutama dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Produksi dalam negeri menurun sehingga menyebabkan sulitnya pemenuhan pengadaan beras dari produksi dalam negeri. Perubahan sistem pendanaan dari sistem persediaan menjadi sistem penggantian menambah beban pembiayaan bagi Perum BULOG. Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Badan Pangan Nasional dinilai kurang efektif dalam stabilisasi harga beras (Rusono, 2019).

Stok beras yang belum optimal yang mengganggu mekanisme pengadaan dan penyaluran beras terutama terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik update per Agustus amatan Juli 2024, angka neraca produksi-konsumsi beras pada Januari-Oktober 2024 sebesar 1,19 juta ton atau lebih rendah 1,66 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Neraca produksi dan konsumsi beras dalam negeri mengalami defisit sebesar -1,66 atau -58,24 %. Selain itu, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, memperhitungkan ketersediaan stok cadangan beras pemerintah per Agustus 2024 sebesar 1,34 juta ton, impor belum terealisasi 1,1 juta ton dan kebutuhan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan Bantuan Pangan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 874 ribu ton, diperkirakan terdapat stok akhir tahun sebesar 1,5 juta ton.

Tabel 1. 4 Produksi dan Konsumsi Bulan Januari-September (Juta Ton Beras)

Bulan	Produksi		Konsumsi		Surplus/ Defisit	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Januari	1.34	0.68	2.54	2.56	-1.20	-1.70
Februari	2.85	1.35	2.54	2.57	0.31	-1.22
Maret	5.13	3.38	2.54	2.57	2.59	0.81
April	3.66	5.31	2.55	2.57	1.11	2.74
Mei	2.86	3.61	2.55	2.57	0.31	1.04
Juni	2.79	2.06	2.55	2.58	0.24	-0.52
Juli	2.48	2.05	2.55	2.58	-0.07	-0.53
Agustus	2.52	2.85	2.55	2.58	-0.03	0.27
September	2.52	2.87	2.56	2.58	-0.04	0.29
Oktober	2.19	2.59	2.56	2.58	-0.37	0.01
Jumlah	28.34	26.93	25.49	25.74	2.85	1.19
Selisih 24-23	Selisih Produksi	-1.41 -4.97 %	Selisih Konsumsi	0.25 0.98 %	Selisih (Prod - Kons)	-1.66 -58.24%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pangan Nasional, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam rangka antisipasi hari besar keagamaan tahun 2024 dan kebutuhan tahun 2025, maka dibutuhkan sisa stok akhir tahun sebesar 2,5 juta ton, sehingga terdapat kekurangan 1 juta ton (Bapanas, 2024). Kekurangan stok tersebut tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri karena neraca produksi dan konsumsi beras dalam negeri mengalami defisit, sehingga dapat dipenuhi melalui impor. Indonesia menduduki negara importir urutan ke- 46 dunia selama 2019-2022, namun dengan adanya impor beras medium tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat pertama. Pasar beras di Indonesia dikuasai oleh beras Vietnam dan Thailand (Kementan, 2024).

Pada tahun 2025 stok beras di Perum BULOG melebihi minimal total stok yang dikelola yaitu sebesar 2.400.000 ton. Stok beras di gudang BULOG seluruh kantor wilayah yang ada di Indonesia total stok per 24 September 2025 mencapai 3.877.703 ton. Hal ini menjadi tantangan bagi Perum BULOG untuk segera mempercepat penyaluran CBP untuk mengurangi beban biaya simpan dan penurunan kualitas beras.

Produksi dalam negeri juga belum optimal sehingga menyebabkan sulitnya pemenuhan pengadaan beras dari produksi dalam negeri. Produksi beras di seluruh wilayah Indonesia tidak merata, beberapa daerah produsen akan menghasilkan surplus beras. Sementara di lain daerah yang bukan produsen hanya menghasilkan produksi padi yang hanya cukup dikonsumsi oleh wilayah setempat bahkan defisit. Oleh karena itu, tingkat aspek ketersediaan dan keterjangkauan pasokan menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan cadangan beras. Di sini Perum BULOG perlu hadir untuk melakukan efisiensi dan keandalan dalam manajemen logistik pengelolaan CBP.

Perubahan sistem pendanaan dari sistem persediaan menjadi sistem penggantian menambah beban pembiayaan bagi Perum BULOG. Skema pendanaan Perum BULOG melakukan pengadaan/pembelian dengan menggunakan dana dari pinjaman bank komersial. Pembayaran penggantian dari pemerintah memerlukan waktu yang cukup lama karena penggantian dapat dilakukan setelah disalurkan dan dilakukan revaluasi oleh APIP/BPKP secara periodik. Sehingga berdampak pada beban bunga yang tinggi karena stok yang disimpan dan proses penggantian pemerintah yang cukup lama.

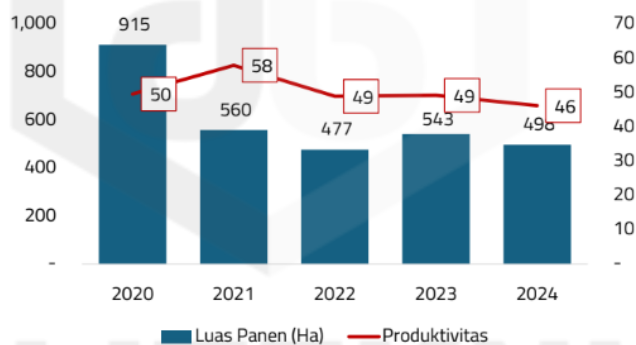
Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Badan Pangan Nasional dinilai kurang efektif dalam stabilisasi harga beras. HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk HET beras premium, zona 1 Rp13.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. Saat ini harga beras premium berdasarkan data Bapanas mencapai Rp 14.270, sedangkan Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag sebesar Rp 14.555. Terjadi kenaikan harga sekitar 14,34-15,26%

berdasarkan perbandingan harga antara bulan September 2022 dengan September 2023. Bapanas saat ini mencapai Rp 12.620, sedangkan data SP2KP Kemendag sebesar Rp 12.740. Terjadi kenaikan harga beras medium sekitar 15,25 - 20,15%, berdasarkan perbandingan harga antara bulan September 2022 dengan September 2023. Kebijakan HET beras kurang efektif untuk meredam harga beras karena harga beras di pasar saat ini sudah melebihi HET dan kurangnya pengawasan HET beras.

Pengelolaan cadangan beras pemerintah merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan pangan di masyarakat. Keterjangkauan pangan dapat dilihat ketika masyarakat mampu mengakses pangan dari sisi ekonomi maupun fisik. Dari sisi ekonomi, keterjangkauan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau daya beli, kemiskinan, dan stabilitas harga pangan. Selain itu, dari sisi fisik keterjangkauan pangan titik terdekat dari masing-masing rumah tangga/keluarga. Daya beli rumah tangga/keluarga miskin terhadap kebutuhan pangan maupun non pangan dikategorikan rendah. Pendapatan berperan penting dalam merespon konsumsi dari setiap komoditas pangan. Harga juga menjadi faktor lain dalam pertimbangan konsumsi pangan rumah tangga/keluarga. Ketika terjadinya kenaikan harga pangan maka konsumsi rumah tangga/keluarga akan berkurang. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan akses pangan bagi masyarakat melalui pemberian Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diambil dari cadangan pangan pemerintah.

Tujuan kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Namun masih menghadapi tantangan dalam pengawasan distribusi dan kepatuhan terhadap HET menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan program ini untuk mencapai tujuan stabilisasi yang optimal. Pada RPJMN 2025-2029, cadangan pangan merupakan program prioritas dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan.

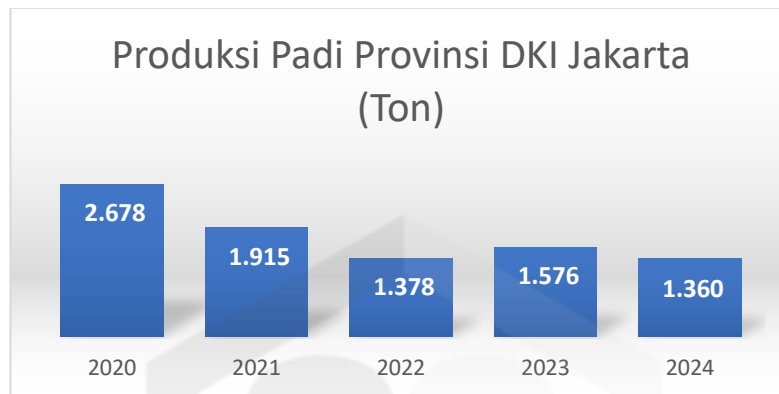
Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) perlu diteliti secara mendalam karena menyangkut beberapa aspek penting terkait ketahanan pangan nasional melalui strategi 4K: ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Lokasi kajian evaluasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) khususnya di Wilayah Jakarta yang menjadi barometer harga pangan dan bukan daerah produsen beras sehingga ketersediaan beras menjadi faktor penting bagi pemerintah. Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan, memiliki lahan pertanian yang sangat terbatas diikuti dengan produksi (padi) yang juga rendah.



Gambar 1. 1 Luas lahan dan Produktivitas Padi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada gambar diatas menunjukan luas lahan panen di DKI Jakarta sebesar 498 ha di tahun 2024 dan cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Produktivitas lahan mencapai 46 ku/ha lebih rendah dari nasional 52,90 ku/ha. Lahan padi di DKI Jakarta terbesar terletak di Jakarta Utara (443 ha) diikuti dengan Jaktim (28 ha) dan Jakbar (27 ha).

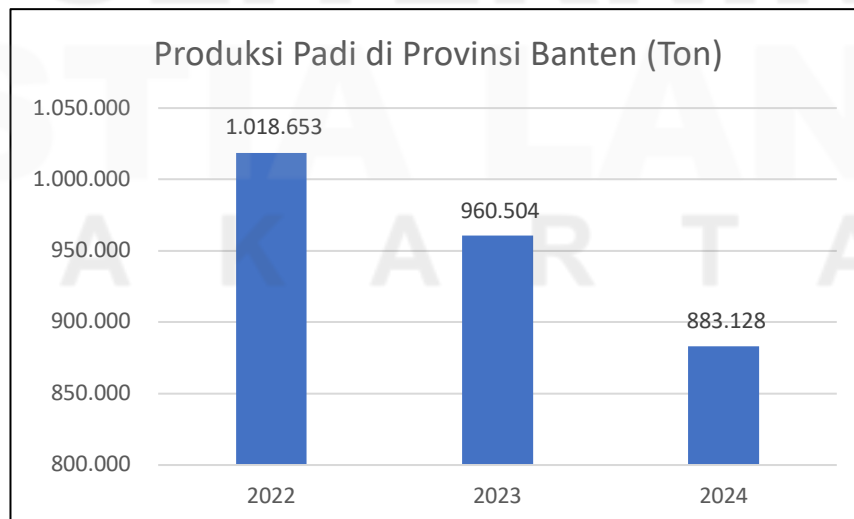


Gambar 1. 2 Produksi Padi Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Seiring jumlah lahan pertanian yang cenderung menurun, produksi padi turun menjadi 1.360 ton (setara beras) pada tahun 2024, dibandingkan kebutuhan 941.791 ton. Produksi beras di Jakarta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di Jakarta 2.600 ton per hari, walaupun produksi optimal dari sepanjang tahun.

Sedangkan Banten berbatasan langsung dengan Jakarta sehingga fluktuasi pasokan dan harga beras memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap Jakarta dan merupakan daerah rawan pangan yang rentan terhadap gejolak harga dan pasokan.



Gambar 1. 3 Produksi Padi Provinsi Banten

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Produksi padi di provinsi banten dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 883.128 ton pada tahun 2024. Provinsi Banten termasuk dalam daerah yang harga beras melebihi HET (12.500) yaitu 13.750 dan diperlukan adanya intervensi untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi di Perum BULOG DKI Jakarta dan Banten terkait dengan Evaluasi Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta Dan Banten antara lain:

1. Stok beras yang berlebih mengganggu mekanisme penyimpanan beras terutama terkait kualitas beras.
2. Perubahan sistem pendanaan dari sistem persediaan menjadi sistem penggantian akan menambah beban pembiayaan bagi Perum BULOG.
3. Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Badan Pangan Nasional dinilai kurang efektif dalam stabilisasi harga beras.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan identifikasi permasalahan, maka permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten?
2. Bagaimana Strategi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten kedepannya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian kinerja pada kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten.
2. Menyusun strategi agar kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten dapat diimplementasikan dengan optimal.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam menambah wawasan dalam kebijakan publik khususnya terkait Evaluasi Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait dengan Evaluasi Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten dinilai dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kebijakan ini menunjukkan kelayakan untuk dilanjutkan, meskipun kinerja kebijakan ini belum mencapai tingkat optimal pada beberapa kriteria dan masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi. Adapun strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk menghadapi tantangan dengan melakukan sinergi pengawasan bersama satgas pangan untuk melakukan langkah korektif atas indikasi adanya penyimpangan penyaluran SPHP beras, menyusun kebijakan penyederhanaan dalam pertanggungjawaban penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan menyiapkan kebijakan yang mendelegasikan Perum BULOG sebagai pendistribusi beras premium untuk memenuhi preferensi masyarakat dalam meningkatkan branding dan marketing. Berikut penjelasan dari aspek-aspek tersebut adalah:

1. Kinerja kebijakan evaluasi kebijakan dapat dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Walaupun dari beberapa aspek seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan belum optimal sehingga perlu langkah-langkah perbaikan yang dapat mengatasi permasalahan dari beberapa aspek tersebut.
2. Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya kinerja kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berdasarkan capaian jangka waktu (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang)

yakni sebagai berikut: sinergi pengawasan bersama satgas pangan untuk melakukan langkah korektif atas indikasi adanya penyimpangan penyaluran SPHP beras, menyusun kebijakan penyederhanaan dalam pertanggungjawaban penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan menyiapkan kebijakan yang mendelegasikan Perum Bulog sebagai pendistribusi beras premium untuk memenuhi preferensi masyarakat dalam meningkatkan branding dan marketing.

B. Saran

Rekomendasi dari hasil penelitian evaluasi kinerja kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari peneliti akan diimplementasikan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. sebagai berikut:

1. Strategi jangka pendek dengan melakukan sinergi pengawasan bersama satgas pangan (POLRI) untuk melakukan langkah korektif atas indikasi adanya penyimpangan penyaluran SPHP beras melalui:
 - a. Pembentukan tim pengawas digital yang berasal dari gabungan Perum BULOG dan satgas pangan (POLRI) untuk memproses secara cepat sesuai SOP pengaduan keluhan penyaluran SPHP dari masyarakat maupun saluran penjualan (mitra perum BULOG) di lapangan secara digital yang terhubung langsung dengan sistem informasi Perum BULOG.
 - b. Menyusun kebijakan yang dapat mengembangkan karir dan memberikan kesejahteraan bagi tim pengawas digital yang berhasil melakukan identifikasi dan mengoreksi penyimpangan secara akurat.
 - c. Menyusun *standar operasional procedure* (SOP) yang mencakup *checklist* penemuan penyimpangan, langkah-langkah korektif untuk

- mengatasi penyimpangan, dan memastikan konsistensi penegakan aturan di lapangan.
- d. Mengembangkan aplikasi kasir digital yang terhubung langsung dengan sistem informasi pemesanan Perum BULOG untuk mencatat penjualan secara *realtime* dan mendeteksi jika terdapat pedagang atau mitra penyalur SPHP yang melakukan penjualan di atas harga eceran tertinggi dan melebihi batas penjualan dan memperkuat sistem layanan pengaduan keluhan dari mitra perum BULOG maupun masyarakat.
 - e. Menetapkan audit secara acak dengan menekankan pada saluran penjualan yang rawan penyimpangan dari hasil laporan pengaduan.
2. Strategi jangka menengah dengan menyusun kebijakan penyederhanaan dalam pertanggungjawaban penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui:
- a. Mengajukan penyederhanaan dokumen pertanggungjawaban kepada Kementerian keuangan dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan melakukan pelatihan intensif bagi staf pengelola keuangan mengenai digitalisasi dokumen.
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk koordinasi penyederhanaan dokumen pertanggungjawaban dan digitalisasi dokumen pertanggungjawaban untuk mengurangi biaya cetak, dan pengarsipan fisik.
 - c. Menerbitkan petunjuk teknis penyederhanaan format laporan dan merancang formulir pertanggungjawaban yang mudah diisi oleh mitra dan mudah diverifikasi oleh Perum BULOG.
 - d. Mengembangkan sistem otomatisasi verifikasi data untuk menverifikasi kesesuaian data dari dokumen yang diunggah mitra dan data *entry* Perum BULOG.

- e. Mengimplementasikan pertanggungjawaban berbasis risiko dengan mewajibkan proses verifikasi secara detail hanya untuk transaksi mitra dengan riwayat ketidakpatuhan tinggi.
3. Strategi jangka panjang dengan menyiapkan kebijakan yang mendelegasikan Perum Bulog sebagai pendistribusi beras premium untuk memenuhi preferensi masyarakat dalam meningkatkan branding dan marketing.
- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan tingkat daya saing dan risiko dari proses pengadaan sampai dengan penjualan antara Perum BULOG dan pihak swasta dalam penyediaan beras premium.
 - b. menyiapkan naskah akademik yang mendukung penyusunan regulasi pendelegasian Perum Bulog sebagai pendistribusi beras premium.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Aldillah, R. (2017). Strategi pengembangan agribisnis jagung di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 15(1), 43-66.
- Azman, A. B., Majid, M. A. A., & Zulkifly, M. I. (2024). Food supply and crisis management towards food security: A review through the lens of malaysian micro-food businesses. *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*, 1397(1), 012029. doi:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1397/1/012029>
- Danil K, N. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa. IPDN.
- Hermanto. (2014). Peran Cadangan Beras Darurat Di Kawasan Asia Tenggara Role of Emergency Rice Reserve in Southeast Asia Region.
- Herwiansyah, H. (2024). Evaluasi Kebijakan Program Bantuanpangan Beras Di Kelurahan Pemurus Luar Kota Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Husein, M. (2008). Perum BULOG dalam Inpres Perberasan No. 3/2007: Evaluasi Kebijakan dan Implementasinya. *Jurnal Pangan*.
- Ibrahim, S. N. K., Hidayati, F., Umaternate, R., & Taufiqurrokhman, T. (2024). Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan Program Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah 2024. *Menara Ilmu*, 18(1), 76–85. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5554>
- Ibrohim, M., Ardiyansyah, F., & Rudyarta, R. (2025). Strategi Indonesia dalam Menekan Ketergantungan Impor Gandum dan Kedelai (2010–2023): Perspektif Ketahanan Ekonomi Nasional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2410-2420.
- Li, C. (2025). The evolution of food security in Japan—Based on an indicator evaluation system including climate change indicators. *PLoS One*, 20(2) doi:<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317180>
- Montesclaros, J. M. L. (2025). Food security and crises in southeast asia: Is this time different? *Asia Policy*, 20(3), 13-22. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/food-security-crises-southeast-asia-is-this-time/docview/3238449712/se-2>
- Rusono. (2019). Strengthening Policy on Government Rice Stock Management.

- Paisal, P. (2023). Implementasi Kebijakan Pangan Studi Tentang Pengelolaan Hasil Jagung Di Kabupaten Jeneponto= Food Policy Implementation Study Of Corn Production Management In Jeneponto District (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Setiawan, F. (2019). Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia. In Politik dan Pemerintahan (Vol. 8, Issue 2).
- Soma, A. (2019). Strategi pelayanan kebijakan publik pada kelurahan semper timur kecamatan cilincing kota administrasi jakarta utara, UTS. St. Louis: doi:<https://doi.org/10.31219/osf.io/eb7xj>
- Wowiling, V. G., Posumah, H. J., & Londa, V. Y. (2018). Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 4(55).

Buku:

- Abidin, S. Z. (2016). Kebijakan publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Alexander. (1994). Perencanaan Daerah Partisipatif.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek. CV Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik (Terjemahan). Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Dye, T. R. (1975). Policy Analysis and Political Science: Some Problems at the Interface Thomas R. Dye. Policy Studies and the Social Sciences, 2, 281.
- Nasution, S. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung). Tarsito. Library. Fis. Uny. Ac. Id/Opac/Index. Php.
- Ngusmanto. (2015). Pemikiran Dan Praktik Administrasi Pembangunan. Mitra Wacana Media, 165.
- Rangkuti, Freddy, 2006, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Septiani, S. (2020). Administrasi Pembangunan.
- Siagian, S. P. (2017). Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya). Jakarta.
- Solihin, S. E. (2021). Administrasi Pembangunan. Jakad Media Publishing.
- Subarsono, A. G. (2012). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, P. D. (2013). Metode penelitian manajemen. Bandung: Alfabeta, CV.

Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru. Center For Academic Publishing Service.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perpres Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 217 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli sampai dengan Desember 2025